BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Dewasa ini Hubungan Internasional merupakan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang sedang tumbuh. Kalau kita mengatakan sesuatu yang sedang tumbuh, maka ini menunjukkan suatu hal yang ada dalam proses. Proses ini pula mengandung arti sedang berkembang dan sekaligus menunjukkan bahwa bentuk finalnya belum tercapai.

Sebagai konsep, Hubungan Internasional sering didefinisikan sebagai aktivitas manusia dimana individu dan kelompok dari satu negara berinteraksi secara resmi ataupun tidak resmi dengan individu atau kelompok dari negara lain. Hubungan Internasional tidak hanya melibatkan kontak fisik secara langsung, tetapi juga transaksi ekonomi, penggunaan kekuatan militer dan diplomasi, baik secara publik maupun pribadi. Studi Hubungan Internasional ditunjukkan oleh aktivitas-aktivitas yang beragam, seperti perang, bantuan kemanusiaan, perdagangan dan investasi internasional, pariwisata bahkan olimpiade (Lopez dan Stohl, 1989:3).

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Pada kenyataannya Hubungan Internasional tidak terbatas hanya pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu dengan kelompok kepentingan, sehingga negara tidak

selalu sebagai aktor utama tetapi merupakan aktor yang rasional yang dapat melakukan hubungan melewati batas negara.

Dalam interaksi tersebut sering timbul berbagai masalah, oleh karena itu maka hubungan internasional perlu untuk dipahami dan dipecahkan dalam bentuk studi. Studi hubungan internasional itu sendiri dengan demikian merupakan suatu studi tentang interaksi yang terjadi diantara negara-negara berdaulat di dunia atau merupakan studi tentang para pelaku bukan negara atau *non-state* aktor yang perilakunya mempunyai pengaruh dalam kehidupan negara berbangsa.

Hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia merupakan salah satu contoh dari sekian banyak fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional, aktor hubungan internasional bisa saja merupakan merupakan aktor negara atau juga aktor non-negara, seperti yang diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*:

> "Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu" (2005: 4).

Studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang studi yang dinamis. Penyebabnya adalah dinamika yang terjadi dalam sistem internasional itu sendiri. Hubungan-hubungan atau interaksi antar negara merupakan hal yang paling mendasar dalam hubungan internasional, hal ini dapat dipertegas dengan

melihat definisi dari hubungan internasional, yakni hubungan internasional mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan, baik disponsori pemerintah maupun tidak.

Menurut Teuku May Rudy dalam bukunya *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional* yaitu:

> "Hubungan Internasional adalah mencangkup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok, maupun perorangan resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain" (1993: 3).

Dengan adanya berbagai interaksi dalam dunia internasional membuat negara harus saling berlomba dan berpartisipasi dalam dunia internasional. Hubungan internasional merupakan studi mengenai interaksi berbagai aktor yang berpartisipasi di dalam poltik internasional termasuk negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, entinitas subnasional seperti birokrasi, pemerintah lokal dan individu. Hubungan internasional merupakan studi tentang tingkah laku dari aktor-aktor tersebut ketika berpartisipasi baik sendiri-sendiri dan bersama-sama dalam proses politik internasional (Mingst, 1999:2).

Hubungan internasional tercipta dari sebuah interaksi yang terfokus pada masalah ekonomi dan perdagangan, lingkungan, energi, serta permasalahan sosial budaya (Perwita dan Yani, 2005; 128)

2.1.1 Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral merupakan salah satu istilah daripada bentuk-bentuk interaksi dalam Hubungan Internasional berdasarkan pada banyaknya pihak yang melakukan interaksi. Interaksi dilakukan antara dua negara untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Hubungan antara Amerika Serikat dengan Indonesia yang telah terjalin setelah Indonesia merdeka dulu, merupakan salah satu bentuk dari hubungan yang melewati batas-batas negara yang dijalin antara dua negara yang bertujuan untuk memenuhi kepentingannya masing-masing, hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Perwita bahwa bentuk-bentuk interaksi dapat dibedakan berdasarkan atas:

> "Berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan interaksi, intensitas interaksi, serta pola interaksi yang terbentuk, dan di dalam hubungan internasional, interaksi yang terjadi antar aktor dapat dikenali karena intensitas keberulangannya (*recurrent*) sehingga membentuk suatu pola tertentu, sedangkan bentuk-bentuk interaksi berdasarkan benyaknya pihak yang melakukan hubungan, antara lain dibedakan menjadi hubungan bilateral, trilateral, dan multilateral/internasional" (2005: 42).

Pengertian hubungan bilateral diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* sebagai berikut:

> "hubungan bilateral keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antara dua pihak" (2005:42).

Hubungan bilateral juga terjadi karena kepentingan nasional suatu negara tidak dapat terpenuhi dari dalam negerinya sendiri, disini hubungan bilateral merupakan cara suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Hubungan bilateral menjadi penting disaat suatu negara tidak dapat berbuat sesuatu yang signifikan untuk memenuhi kepentingannya.

2.2 Politik Luar Negeri

Menjalin suatu interaksi antar negara tidak lepas dari politik luar negeri, dimana pada hakekatnya politik luar negeri bertujuan untuk meraih *national interest* yang ingin dicapai oleh suatu negara diluar batas negaranya. Kepentingan nasional merupakan suatu nilai-nilai yang hendak dicapai, diperjuangkan dan dipertahankan oleh suatu negara itu dalam dunia internasional. Dalam pelaksanaannya politik luar negeri dilakukan oleh aparat pemerintahan. Disamping aparat pemerintahan, kekuatan-kekuatan sosial politik lain seperti partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan turut pula mempengaruhi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri.

Politik luar negeri diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*: sebagai berikut:

> "politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan "*action theory*", atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional" (2005: 47).

Didalam hubungan internasional politik luar negeri merupakan alat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya yang merupakan negara lain dalam mencapai, memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya.

Politik luar negeri pada dasarnya digunakan untuk memahami tingkah laku atau tindakan suatau negara. Dalam merencanakan politik luar negerinya, suatu negara bukan saja melihat tujuan yang ada dilingkungannya yang dapat mempengaruhi pembentukan politik luar negeri (Rudy, 1993:75).

Perubahan-perubahan di dalam politik luar negeri sering terjadi ketika perkembangan-perkembangan di lingkup internal makin meningkatkan tuntutannya berkenaan dengan kondisi di lingkungan eksternal, atau ketika perkembangan di lingkungan eksternal dianggap mempunyai potensi ancaman bagi keberadaan negara bangsa tersebut. Akhirnya kondisi tekanan dari kedua lingkungan tersebut diproses di dalam benak para pembuat keputusan yang bertindak untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang-peluang didasarkan pada persepsi para pembuat keputusan mengenai kondisi lingkungan di sekitar mereka (Perwita, 2005:68).

Politik luar negeri (*foreign policy*) adalah merupakan serangkaian atau seperangkat kebijaksanaan dari suatu negara dalam interaksinya atau pergaulannya dengan masyarakat dunia yang kesemuanya didasarkan serta untuk memenuhi kepentingan nasional.

2.3 Kerjasama Internasional

Sejak semula, fokus dari teori Hubungan Internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang

diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.

Saat ini, sebagian besar transaksi dan interaksi antarnegara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, ataupun global yang bermunculan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu, dan mengakhiri perundingan dengan membentuk suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses seperti ini biasa disebut kerjasama atau kooperasi.

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kepentingan nasional suatu negara secara khusus merupakan unsur-unsur yang paling penting, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi. Holsti mendefinisikan kerjasama sebagai berikut:

> “Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak” (1988: 209).

Dengan kata lain, Kerjasama Internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut, maka beberapa negara membentuk suatu Kerjasama Internasional.

Pengertian Kerjasama Internasional menurut Kartasasmita adalah:

> "Kerjasama Internasional merupakan akibat dari adanya Hubungan Internasional dan karena bertambah kompleksnya kehidupan manusia didalam masyarakat internasional" (1997: 9).

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005: 33)

Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna (Cooley, 1930:176).

Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional;

- Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
- Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara – negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (2006: 6)

Joseph Grieco mengatakan dalam bukunya *Cooperation among Nations. Europe, America, and Nontariff Barriers to Trade* bahwa kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan ‘objektif’ dan, oleh karenanya, kerjasama akan berakhir jika kepentingan obyektif ini berubah (Sugiono, 2006; 6)

Tujuan dari Kerjasama Internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai.

2.4 Konsep Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh suatu negara, dengan dinamisasi yang terus terjadi di dunia, pertahanan dan keamanan harus lebih ditingkatkan, ditambah dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, pertahanan dan keamanan suatu negara juga harus ditingkatkan, hal tersebut bertujuan agar suatu negara dapat melindungi wilayah atau kedaulatannya dari gangguan yang berasal dari luar negaranya.

Dalam rangka melaksanakan Strategi Pertahanan Negara, kapabilitas pertahanan negara dikembangkan untuk mencapai standar penangkalan. Kapabilitas pertahanan dijelaskan dalam Buku Putih Pertahanan sebagai berikut;

> "kapabilitas pertahanan negara yang mampu menangkal dan mengatasi ancaman agresi terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Dalam lingkup tersebut, kapabilitas pertahanan negara dikembangkan untuk menghadapi kondisi terburuk berupa perang. Jika kapabilitas pertahanan negara dibangun dengan standar konvensional untuk mampu mempertahankan diri dari agresi, niscaya tugas-tugas pertahanan lainnya akan mampu diemban" (http://www.dephan.go.id/buku_ putih, diakses 22 Juni 2009).

Konsep keamanan sangat berhubungan dengan ancaman. Arnold Wolfers menyatakan bahwa keamanan adalah tidak munculnya sesuatu yang secara objektif dirasakan sebagai ancaman dan secara subjektif menimbulkan ketakutan

terhadap suatu nilai. Akan tetapi menurut Perwita, Konsep Keamanan adalah konsep yang masih diperdebatkan (*contested concept*) yang mempunyai makna berbeda bagi aktor yang berbeda (2005: 120).

Keamanan suatu negara ditunjang oleh pertahanan yang diterapkan suatu negara dalam melindungi segala macam bentuk gangguan dari luar negaranya, Sedangkan konsep keamanan seperti yang dikutip dari *Encyclopedia of the Social Sciences* oleh Dr. Kusnanto Anggoro dalam *Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VllI* didefinisikan sebagai sebagai kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar (2003: 2).

Dalam melakukan sebuah hubungan kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan demi terciptanya kesamaan persepsi perlu diketahui bagaimana sebuah bentuk dari konsep kerjasama keamanan itu sendiri.

Keamanan merupakan fenomena yang saling berhubungan, karena itu konsep keamanan suatu negara biasanya melihat kebijakan keamanan negara-negara lain terutama yang secara geografis berdekatan dan juga melihat pada kondisi sistem internasional pada saat itu (Barry, 1991:189-190).

Dengan adanya konsep pertahanan dan keamanan sebagai prioritas utama bagi negara yang sudah merdeka dan diakui kedaulatannya oleh seluruh dunia merupakan hal yang baik dan sangat penting, karena tanpa pertahanan dan keamanan keutuhan dan integritas suatu bangsa dan negara akan dapat terpecah belah, dan secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kehancuran bagi negara tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep pertahanan dan keamanan

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha suatu negara dalam menjaga wilayah dan kedaulatannya.

2.4.1 Kerjasama Pertahanan dalam Hubungan Internasional

Setiap negara di dunia saat awal kemerdekaannya perlu membangun pertahanan agar mampu menjaga wilayah atau kedaulatannya dari gangguan pihak atau negara lain. Dalam hal ini, setiap negara perlu untuk menjalin hubungan dengan negara lain untuk membangun pertahanannya.

Atas dasar yang dijelaskan oleh Vandana dalam bukunya *Theory of International Politics*:

> "*keeping in view the birth of new nation-states and their carving a place for themselves in the international arena, logistics of international political system is fast changing. Many nation states are yet to establish their long term policies, some are nursing problems of traumatic experiences during their creation and others are yet in the process of political emancipation. A climax community nation states is not yet attained. What would be the paradox of the international political system when a climax community of nations will emerge, alive to problems and issues, economic sharing and cooperation, environmental friendly approach, peace and security for all and concern for upholding human rights is a million dollar question. Some time now and some time ages further and the present time will emerge an international political system nearing perfection but always liable to assimilable changes in time*" (1996: 49).

Ketergantungan antar negara dalam sistem dunia saat ini, terutama masalah ekonomi dan lingkungan memberikan pengaruh terhadap kebutuhan pertahanan negara dalam hubungan internasional, kerjasama menjadi hal yang sangat dianjurkan dalam hubungan antar negara tersebut, dinamisasi sistem dunia

menyebabkan setiap negara perlu membuat antisipasi dalam menghadapi permasalahan yang akan muncul. Dijelaskan oleh Vandana dalam bukunya *Theory of International Politics* sebagai berikut:

> "*…But now interdependence of countries, issues of collective security, peace and environment have become prudent. The growing of natural resources are looked upon to trigger conflicts and minor or major wars in future. Substantially, the environmental resource exploitation may work as a factor determining the future of the world system*" (1996: 38-39).

Kerjasama untuk menanggulangi kemungkinan yang terjadi menjadi sesuatu yang sangat penting, karena negara-negara di dunia tidak bisa berdiri sendiri dalam membangun pertahanan bagi negaranya. Negara yang memiliki kepentingan terhadap satu negara biasanya bekerjasama secara bilateral, karena apa yang menjadi kepentingan negaranya masing-masing dapat terpenuhi dengan bekerjasama secara bilateral.

Untuk kerjasama pertahanan yang bersifat regional biasanya didasari keinginan untuk menciptakan sarana prasarana yang mendukung setiap angkatan militer negara-negara dalam kawasan tersebut, hal ini menjadikan negara-negara dalam kawasan tersebut memiliki pertahanan yang kuat dalam menjaga kawasannya dari pengaruh yang berasal dari luar kawasan. Kerjasama pertahanan yang bersifat multilateral atau internasional bertujuan untuk saling membantu, bertukar informasi atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat memperkuat pertahanan masing-masing negara.

Dari hal-hal yang disebutkan diatas, kerjasama pertahanan merupakan contoh interaksi dari negara-negara di dunia yang melewati batas-batas negaranya dan mewakili setiap kepentingan dalam hal pertahanan.

2.4.1.1 *Power* sebagai Aspek Pertahanan Militer

Power merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh suatu negara dalam menyampaikan dan atau mencapai kepentingannya terhadap negara lain. Tak terkecuali, aspek *Power* sangat dibutuhkan dalam bagian pertahanan suatu negara untuk menekan atau bahkan memaksakan kepentingan nasional negara tersebut terhadap negara lain.

Pertahanan negara, dalam hal ini militer, harus memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan-tujuan politik negaranya. Menurut Theodore A. Couloumbis dan James H. Wolfe dalam bukunya *Pengantar Hubungan Internasional*, pengertian *power* dijelaskan sebagai berikut:

> "*Power* adalah sebagai payung konsep yang menunjukkan segala sesuatu yang bisa menentukan dan memelihara kekuasaan aktor A terhadap aktor B. Sebaliknya *power* memiliki tiga unsur. Unsur pertama adalah kekuatan (*force*), yang didefinisikan sebagai ancaman eksplisit atau aktor A menggunakan alat-alat paksa seperti militer, ekonomi dan lain-lain terhadap aktor B untuk mencapai tujuan-tujuan politik A. Unsur kedua adalah pengaruh (*influence*), yang didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi-jenis-kekuatan-oleh aktor A untuk menjaga atau mengubah perilaku aktor B dengan cara-cara yang sesuai dengan preferensi atau keinginan aktor A. Unsur power yang ketiga adalah kekuasaan (*authority*), yang didefinisikan sebagai kerelaan aktor B untuk memenuhi intruksi-intruksi (preskripsi, perintah) yang dikeluarkan oleh aktor A, yang dipelihara dalam persepsi B mengenai aktor A sperti sikap hormat, solidaritas, kasih sayang, afinitas atau pertalian keturunan, kepemimpinan, pengetahuan dan keahlian" (1999: 87-88).

Menurut Vandana dalam bukunya *Theory of International Politics*, *power* dalam aspek militer dijelaskan sebagai berikut:

> "*The military element is an important factor in national power. Military preparedness means, military organization and structures that helps in furtherance of a country's foreign policy objective. A country's power in the military context is based on the quality and quantity of armed forces, and the kind of weaponry-conventional, unconventional or nuclear. The quality of military leadership and planning also adds up as military elements of national power. While all nations may possess weaponry the difference in technology of warfare determines the fates of nations and civilizations. The united States is a major power because of its military preparedness, technology, and quality and quantity of men and arms"* (1996: 126).

Dari penjelasan di atas, tergambar bahwa *Power* dalam pertahanan militer menjadi sangat penting, karena pertahanan suatu negara tidak akan memiliki pengaruh yang berarti bagi negaranya jika tidak memiliki unsur kekuatan yang memaksa atau tidak dapat dipatuhi oleh negara lain.

2.4.2 Kerjasama Keamanan dalam Hubungan Internasional

Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional telah berlangsung lama. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan pasca-Perang Dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan blok Timur. Namun, kini definisi keamanan meliputi juga soal-soal ekonomi, pembangunan,

lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya.

Pasca Perang Dingin keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (*inter-state relations*), tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat. Ini artinya soal-soal yang dulu dipandang sebagai urusan internal suatu negara seperti lingkungan hidup, semakin memerlukan kerjasama dengan negara lain dalam cara mengatasinya (Perwita & Yani, 2005: 119).

Kerjasama keamanan yang mengangkat semua masalah politik dapat dilakukan dengan *Cooperative Security* yang menekankan upaya untuk menciptakan keamanan melalui dialog, konsultasi, pembentukan rasa saling percaya tanpa harus melalui pendekatan-pendekatan formal institusional.

Konsep-konsep dari *cooperative security* dapat dilihat pada kerjasama keamanan negara-negara Asia Pasifik melalui forum ARF (*ASEAN Regional Forum*), jalur kedua atau forum diplomasi, (*second track diplomacy*) dan jalur ketiga (*Track 3*, yaitu LSM dan organisasi-organisasi masyarakat) sebenarnya adalah menyusun hubungan-hubungan baru atas dasar nilai-nilai bersama tentang keamanan sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan bahwa masing-masing aktor harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab sebagai anggota dari masyarakat internasional (Perwita & Yani, 2005: 129).

2.4.2.1 *Security Dialogue*

Salah satu wujud kerjasama pertahanan dan keamanan dilakukan dengan *Security Dialogue*, yang dimaksudkan agar kedua negara yang bekerjasama bisa berkomunikasi tentang berbagai masalah dalam bidang pertahanan dan keamanan, bisa saling mengetahui keadaan pertahanan dan keamanan dalam negeri masing-masing, dan bisa menentukan langkah yang akan ditempuh guna menyelesaikan masalah tersebut. Tentang *Security Dialogue* dijelaskan oleh J. Peter Burgess sebagai berikut:

> "mengamati dan meninjau secara penuh rencana jurnal internasional serta mencari cara untuk mengkombinasikan analisis teori kontemporer dengan tantangan kebijakan publik dalam pembelajaran tentang keamanan yang berseberangan. Oleh karena itu, konsep keamanan harus dilihat dan dituangkan kembali melalui pendekatan atau metodologi baru" (http://www.prio.no/ Research-and-Publications/Security-Dialogue/, diakses 29 Maret 2009).

Jadi dalam *Security Dialogue* yang diadakan oleh dua negara tersebut, pembahasan dan dialog tentang keamanan tidak dapat dilakukan dengan teori-teori yang sederhana, harus ada kombinasi antara teori yang dijadikan pijakan dengan kebijakan tentang keamanan yang berseberangan sebagai akibat perbedaan letak wilayah ataupun dasar negara yang dianut. Perlu adanya pendekatan atau cara-cara baru untuk menyamakan perbedaan tersebut agar tidak terjadi kemungkinan kesalahpahaman dalam menanggapi masalah keamanan di kedua negara atau kawasan.

2.5 Konsep Kapabilitas

Kapabilitas angkatan bersenjata suatu negara merupakan hal yang harus terus ditingkatkan agar dapat terus menyokong pertahanan dan keamanan negara. Definisi kapabilitas dalam *www.TheFreeDictionary.com* diartikan sebagai bakat atau kemampuan yang memiliki potensi untuk digunakan atau dikembangkan" (http://www.thefreedictionary.com/capability, diakses 16 Mei 2009).

Dan dijelaskan oleh Vazquez yang dikutip dari buku *World Politics* karangan Charles W. Kegley, Jr dan Eugene R. Wittkopf, kapabilitas juga merupakan faktor yang sangat menentukan bagi politik luar negeri suatu negara dan kemampuan militernya, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

> "*The proposition that state's internal capabilities shape their foreign policy priorities is supported by the demonstrable fact that state's preparations for war strongly influence their later use of force. Thus while all states may seek similar goals, their ability to realize them will vary according to their military capabilities"* (1999: 48).

Dengan definisi tadi, potensi suatu angkatan bersenjata harus terus dikembangkan mengikuti dinamisasi politik pertahanan dan keamanan yang terjadi di dunia, dan digunakan untuk kebaikan negara tersebut ke dalam dan ke luar negerinya.

2.5.1 Kapabilitas Militer

Dalam hal ini, kapabilitas yang harus dimiliki TNI adalah kapabilitas militer. Dalam *www.TheFreeDictionary.com*, kapabilitas militer diartikan sebagai

kemampuan untuk mencapai tujuan perang yang tepat sasaran (memenangkan perang atau pertempuran, menghancurkan sasaran). Hal ini termasuk ke dalam empat komponen utama.

1. Struktur pertahanan, jumlah personil, ukuran pasukan, dan komposisi unit yang terdiri dari beberapa divisi kekuatan pertahanan, seperti angkatan laut dan angkatan udara.
2. Modernisasi, kekuatan kecanggihan secara teknis, pasukan, sistem persenjataan, dan perlengkapan.
3. Kesiapan Pasukan, kesiapan untuk menyediakan kapabilitas yang diperlukan oleh komandan pasukan untuk menjalankan tugas yang diberikan. Hal ini berdasarkan dari kemampuan setiap personil yang telah dirancang untuk hasil yang diinginkan.
4. Pengendalian, kemampuan untuk mengatur tingkatan yang diperlukan dan durasi aktifitas operasional untuk mencapai tujuan militer. Pengendalian adalah fungsi untuk menyediakan dan menjaga tingkat kesiapan pasukan, material, dan keperluan yang dipakai untuk mendukung kebutuhan militer (http://www.thefreedictionary.com/military+capability, diakses 16 Mei 2009).

Menurut Vandana dalam bukunya *Theory of International Politics,* faktor-faktor yang sangat menentukan dalam aspek militer dijelaskan sebagai berikut:

> "*The military element is an important factor in national power. Military preparedness means, military organization and structures that helps in furtherance of a country's foreign policy objective. A country's power in the military context is based on the quality and quantity of armed forces, and the kind of weaponry-conventional, unconventional or nuclear. The quality of military leadership and planning also adds up as military elements of national power. While all nations may possess weaponry the difference in technology of warfare determines the fates of nations and civilizations*" (1996: 126).

Seperti dijelaskan oleh Vandana di atas, faktor kualitas dan kuantitas, jenis senjata konvensional dan senjata non-konvensional, serta kualitas kepemimpinan

militer menjadi dasar bagi kapabilitas militer suatu negara dalam menjaga wilayah dan kedaulatannya.

Dijelaskan juga dalam buku *World Politics* karangan Charles W. Kegley, Jr dan Eugene R. Wittkopf tentang kapabilitas militer, bahwa kecenderungan kapabilitas militer suatu negara mengalami peningkatan terutama di negara-negara kaya, seperti disebutkan:

> "*The 1995 level actually shows an increase over past levels, 2.6 times that spent in 1960, 1.8 times that of the 1970 total, and 1.2 times the 1980 level…Historically, the rich countries have spent the most money on arms acquisitions, apattern that has continued*" (1999: 388).

Selain hal yang dijelaskan diatas, kapabilitas militer juga mengalami perubahan, hal ini dijelaskan juga oleh Charles W. Kegley, Jr dan Eugene R. Wittkopf dalam buku *World Politics* sebagai berikut:

> "*The growing militarization of the Global South manifest itself in other ways as well. Military capabilities are now more widespread than ever. Part of the reason is because weapons-production capabilities are no longer concentrated in the industrial North. The Global South countries now are in the business of manufacturing modern aircraft, tanks, and missiles. A parallel change in the international arms trade and in the destructiveness of modern weapons has accelerated the spread of military capabilities throughtout the globe*" (1999: 390).

Bahwa ada perkembangan pesat militer di negara-negara Selatan (berkembang) yang berpengaruh terhadap peningkatan kapabilitas militernya, beberapa hal yang menyebabkannya adalah negara berkembang telah mampu ikut serta dalam industri pembuatan pesawat terbang, *tank*, dan misil.

Dengan penjelasan-penjelasan dan beberapa sebab yang telah disebutkan di atas, kapabilitas TNI menjadi suatu modal yang harus terus ditingkatkan agar sesuai dengan perkembangan atau dinamisasi yang terjadi dalam perpolitikan dunia maupun keadaan dalam negeri Indonesia sendiri.

2.6 Konsep Pengaruh

Amerika Serikat berperan dalam memberikan pengaruhnya terhadap kehidupan politik Indonesia, tak terkecuali dalam kerjasama untuk meningkatkan kapabilitas TNI, menurut Holsti dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* karangan Perwita dan Yani konsep pengaruh didefinisikan sebagai:

> "Kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan" (2005 : 31).

Dalam "*International Politics: A Framework for Analysis"*, Holsti mengungkapkan definisi pengaruh sebagai berikut:

> "Pengaruh adalah kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan alat untuk mencapai satu tujuan" (1988:159).

Daniel S. Paap memaparkan bahwa pengaruh dinyatakan secara tidak langsung oleh kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan yang menentukan *outcomes* (Perwita dan Yani, 2005: 31).

Perwita dan Yani juga menjelaskan lebih lanjut asumsi dasar konsep pengaruh, menurut Alvin Z. Rubenstein, yaitu:

1. Secara operasional konsep pengaruh digunakan secara terbatas dan spesifik mungkin dalam konteks transaksi diplomatik.
2. sebagai konsep multidimensi, konsep pengaruh lebih dapat diidentifikasikan daripada diukur oleh beberapa kebenaran (proposisi). Sejumlah konsep pengaruh dapat diidentifikasikan hanya sedikit, dikarenakan tingkah laku B yang dapat mempengaruhi A terbatas.
3. Jika Pengaruh A terhadap B besar, akan mengancam sistem politik domestik B, termasuk sikap, perilaku domestik dan institusi B.
4. Pengetahuan yang dalam mengenai politik domestik B sangat penting untuk mempelajari hubungan kebijakan luar negeri antara A dan B dikarenakan pengaruh tersebut akan dimanifestasikan secara konkret dalam konteks isu area tertentu dari B.
5. pada saat seluruh pengaruh dari suatu negara dikompromikan dengan kedaulatan negara lain secara menyeluruh dan kadang-kadang dapat memperkuat atau memperlemah kekuatan pemerintah dari negara yang dipengaruhi, terdapat batasan dimana pengaruh tersebut tidak berpengaruh terhadap suatu negara atau pemimpin negara tersebut. Pemerintah B tidak akan memberikan konsesi-konsesi terhadap A yang dapat melemahkan kekuatan politik domestik B, kecuali bila A menggunakan kekuatan militer terhadap B.
6. Negara donor berpengaruh terhadap negara-negara yang lain yang menerima bantuan-bantuan yang diberikannya, tidak hanya ada timbal balik dari B kepada A, akan tetapi juga reaksi C, D, E, F, dan seterusnya yang dapat berpengaruh terhadap hubungan A dan B.
7. Data-data yang relevan untuk mengevaluasi pengaruh terdiri dari lima kategori, yaitu:
    a. Ukuran perubahan konsepsi dan tingkah laku.
    b. Ukuran interaksi yang dilakukan secara langsung.
    c. Ukuran dari pengaruh yang ditujukan
    d. Studi kasus
    e. Faktor perilaku idiosinkratik.
8. Sistem yang biasa digunakan untuk menentukan pengaruh adalah dengan menggunakan variabel yang ada diantara negara-negara. Yang paling baik adalah model yang dapat digunakan untuk tipe masyarakat dengan area geografis dan budaya yang sama. (2005: 31-33).

Lebih lanjut Rubenstein berpendapat bahwa pengaruh memiliki beberapa konsep, yaitu:

1. Hal yang dipengaruhi.
2. Perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri atau dalam negeri.
3. Asumsi, kriteria, dan data yang penting dalam menganalisis hal yang dipengaruhi dan perubahan dalam kebijakan dalam dan luar negeri.

Lingkungan eksternal dan internal memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Pengaruh adalah hasil yang timbul sebagai kelanjutan dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumbernya, dalam hal ini syaratnya adalah terdapat keterkaitan (relevansi) yang kuat antara sumber dengan hasil (Rubenstein, 1976:3-6).

Sedangkan salah satu pakar hubungan internasional K.J Holsti memberikan definisinya mengani konsep pengaruh beserta variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan pengaruh,

> "Pengaruh adalah perangkat untuk mencapai tujuan digunakan untuk mencapai atau mempertahankan tujuan, termasuk didalam tujuan adalah prestise, keutuhan wilayah, semangat nasional, bahan mentah, keamanan, atau persekutuan" (Holsti, 1987: 201-203).

Dari sisi sudut pandang negara, variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan pengaruh ialah:

1. Kapabilitas negara.
2. Persepsi terhadap pemakaian kapabilitas tersebut.
3. Kebutuhan antara dua negara dalam hubungan yang saling mempengaruhi.
4. Kualitas ketanggapan.
5. Pengorbanan dan komitmen (Holsti, 1987:209).

Sedangkan menurut T. May Rudy, "Pengaruh" sendiri dapat dianalisis dalam empat macam bentuk:

1. Pengaruh sebagai aspek kekuasaan, pada hakikatnya adalah saran untuk mencapai tujuan.
2. Pengaruh sebagai sumber daya yang digunakan dalam tindakan terhadap pihak lain, melalui cara-cara persuasif, sampai koersif dengan maksud mendesak untuk mengikuti kehendak yang memberikan pengaruh.
3. Pengaruh sebagai salah satu proses dalam rangka hubungan antara satu sama lain (individu, kelompok, organisasi, dan negara).
4. Besar-kecilnya pengaruh ditinjau secara relatif dengan membandingkan melalui segi kuantitas (besar-kecilnya keuntungan atau kerugian).

Dimana besar kecilnya kekuasaan sangat menentukan besar kecilnya suatu pengaruh, bentuk pengaruh ini dapat berupa:

1. Mengarahkan atau mengendalikan untuk melakukan sesuatu.
2. Mengarahkan atau mengendalikan untuk tidak melakukan sesuatu (Rudy, 1993:24-25).

Dari pemaparan tentang konsep pengaruh diatas, dapat ditarik pengertian bahwa pelaku politik dapat mempengaruhi tingkah laku orang lain atau suatu negara dengan cara-cara yang dikehendaki pelaku politik tersebut untuk mencapai tujuan negaranya. Pengaruh yang diberikan pelaku politik tersebut merupakan cara untuk mempertahankan tujuan negaranya.